



**MANAJEMEN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESA DI HUTARAJA KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh

**SRI WAHYUNI PANE
NIM. 1430400010**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**MANAJEMEN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESA DI HUTARAJA KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh

SRI WAHYUNI PANE
NIM. 1430400010

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2021



**MANAJEMEN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DESA DI HUTARAJA KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

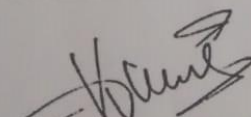
SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

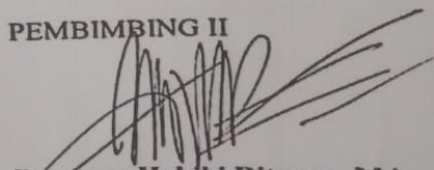
Oleh

**SRI WAHYUNI PANE
NIM. 1430400010**

PEMBIMBING I


Drs. Kamaluddin, M. Ag.
NIP. 19651102 199103 1 001

PEMBIMBING II


Dr. Anas Habibi Ritonga, MA.
NIP. 198404032015031004

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **SRI WAHYUNI PANE**
lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, Maret 2021
Kepada Yth:
Bapak Dekan FDIK
IAIN Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **SRI WAHYUNI PANE** yang berjudul: "**Manajemen Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199102 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Anas Habibi Ritonga, MA
NIP. 19840403 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Wahyuni Pane**
Nim : **1430400010**
Fak/Prodi : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi/MD**
Judul Skripsi : **Manajemen Masyarakat dalam Pembangunan Desa di
Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.**

Dengan inimenyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpunan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpunan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpunan, 25 Oktober 2021
Pembuat Pernyataan



Sri Wahyuni Pane
NIM: 14 304 00010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

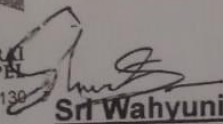
Nama : Sri Wahyuni Pane
Nim : 14 304 00010
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Manajemen Masyarakat dalam Pembangunan Desa"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : Juli 2021
Yang menyatakan,




Sri Wahyuni Pane
NIM. 14 304 00010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : SRI WAHYUNI PANE
NIM : 14 304 00010
Judul skripsi : MANAJEMEN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DESA DI DESA HUTARAJA
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING
NATAL

Ketua

Risdawati Slegar, M.Pd.
NIP. 19760302 200312 2 001

Sekretaris

Dr. Anas Habibi Ritonga, MA.
NIP. 19840403 201503 1 004

Anggota

Risdawati Slegar, M.Pd.
NIP. 19760302 200312 2 001

Dr. Anas Habibi Ritonga, MA.
NIP. 19840403 201503 1 004

Drs. H. Armyan Hasibuan, M.Ag.
NIP. 19620924 199403 1 005

Drs. Kamaluddin, M.Ag.
NIP. 19651102 199102 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Tanggal	: 17 Maret 2021
Pukul	: 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai	: 71(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3.0
Predikat	: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: ¹A21 /In.14/F.4c/PP.00.9/10/2021

Skripsi Berjudul : **MANAJEMEN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
DI DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

Ditulis oleh : **SRI WAHYUNI PANE**
NIM : **1430400010**
Program Studi : **Manajemen Dakwah**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 26 Oktober 2021
Dekan


Dr. Ali Sati, M.Ag.
NIP.19620926 199303 1 001

ABSTRAK

Nama : Sri Wahyuni Pane

NIM : 1430400010

**Judul : Manajemen Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Huta Raja
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.**

Manajemen dalam hal pembangunan desa sangat penting, tanpa adanya manajemen dari suatu pembangunan tidak akan sempurna. Kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong. Dalam pembangunan desa, peran pemerintah desa sangat penting karena memberikan sosialisasi kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan suatu proses pembangunan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di desa Hutara kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal juga dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen masyarakat terhadap pembangunan desa yang dimediasi oleh pemerintah desa. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha menginterpretasikan, menggambarkan informasi dengan kata-kata atau objek dengan sistematis sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan agar memperoleh kesimpulan. Untuk mendapatkan hasil penelitian, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada jajaran pemerintahan desa Hutaraja yaitu kepala desa, wakil kepala desa, sekretaris, kaur keuangan, dan kaur pembangunan mereka adalah sumber data primer dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data skundernya terdiri dari *hatobongan*, kader Posyandu dan perwakilan dari Naposo Nauli Bulung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya manajemen masyarakat, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan. Program Pembangunan desa memahami bagaimana cara melaksanakan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kreativitas yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Pembangunan sarana dan prasarana memberikan kemaslahatan karena masyarakat merasakan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

Kata Kunci : Manajemen Masyarakat dan Pembangunan Desa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah* peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “ **MANAJEMEN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA DI HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**”. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat serta petunjuk kepada seluruh ummat manusia untuk membahagiakan dunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan syukur dan terimakasih atas motivasi dan dukungan baik secara material maupun inmaterial dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajaran lainnya yang tidak dapat disebutkan. Semoga semuanya diberikan rahmat, anugerah dan petunjuk dari Allah Swt.
2. Bapak Drs. Kamaluddin, M. Ag. dan Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, MA selaku pembimbing ke-I dan ke-II atas bimbingan dan arahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah selalu menganugerahkan kebikan dan ilmu yang luas yang bermanfaat bagi orang banyak.

3. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Wakil Dekan I,II dan III, para Kajur baik Kajur KPI, BKI, PMI dan MD, para dosen, dan staff kepegawaian di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Semoga apa-apa saja yang dikerjakan memberikan keberkahan bagi kehidupan kita maupun keluarga. Semoga para staff dan pegawai yang belum PNS segera diberikan jalan oleh Allah untuk menjadi PNS ditahun 2021 ini.
4. Kepala Perpustakaan dan jajarannya serta staf-staf pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan, semoga senantiasa diberikan kelapangan hati dan fikiran disetiap langkah-langkah kehidupan.
5. Ayah dan Ibu serta suami saya yang tercinta yang selama hidupnya tidak pernah berhenti berdo'a untuk anak-anaknya agar menjadi anak yang shaleh dan shalehah serta berbakti kepada kedua orangtua, menyayangi mereka dan saudara. Semoga Ayah dan suami saya senantiasa diberikan kesehatan dan ibu saya yang telah berada disisi Allah, semoga ditempatkan ditempat yang terbaik oleh Allah Swt.
6. Terimakasih buat keluarga besar saya baik dari pihak keluarga Ayah (Opung, Nenek, Ua, Uda, Nanguda, Bou dan Amangboru, Abang, Kakak maupun Adik-adik semua). Begitu juga dari pihak keluarga Ibu (Opung, Nenek, Tulang, Nangtulang, Uda, dan Ete, Abang, Kakak maupun Adik-adik semua) yang selalu mendukung dan memotivasi baik dari segi materi dan non materi. Semoga Allah SWT. semoga apa-apa yang dicita-citakan dapat tercapai dan semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan berlipat ganda bagi kita dan menjadikan kita keluarga yang senantiasa menjalin silaturahmi.

7. Terimakasih kepada seluruh guru-guru saya baik formal maupun non formal. Semoga segala ilmu yang saya terima mampu saya amalkan dan saya ajarkan kepada orang banyak. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan untuk kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak.
8. Terimakasih kepada seluruh teman-teman MD angkatan 2014, kakak dan abang kelas, adik kelas maupun teman-teman diberbagai jurusan baik di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan dan Fakulatas Syariah dan Ilmu Hukum. Semoga Allah Swt. senantiasa mempermudah urusan kita. Ddan bagi yang belum memiliki penghasilan dan pekerjaan, semoga Allah membuka jalan-Nya.
9. Terimakasih kepada kepala desa Hutaraja beserta seluruh aparatur desa, dan juga masyarakat desa Hutaraja dan saudara semua yang telah mengajarkan saya tentang arti kehidupan serta membantu saya dalam hal pemberi informasi mengenai penelitian ini. Semoga masyarakat desa Hutaraja semakin kompak dan maju dalam berbagai aspek kehidupan.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah SWT, Peneliti mohon maaf lahir dan bathin atas segala kesalahan dan kekhilafan yang terdapat dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya rabbal alamin.*

Padangsidempuan, Rabu, 7 Juli 2021

Peneliti

SRI WAHYUNI PANE
NIM. 1430400010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.'.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
و	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis at
ي.....	Kasrah dan ya	I	i dan garis dibawah
و.....	dommah dan wau	U	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapatharkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapatharkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ١. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab- Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	3
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Masyarakat.....	8
1. Pengertian Manajemen.....	8
2. Pentingnya Manajemen.....	11
3. Fungsi-fungsi Manajemen.....	14
4. Pengertian Masyarakat.....	16
5. Pembagian Jenis Masyarakat.....	16
B. Pembangunan Desa.....	17
1. Pembangunan dari dalam	17
2. Desa	21
C. Dasar-Dasar Pembangunan Desa.....	34
D. Tipologi desa.....	36
E. Perencanaan Pembangunan Desa	39
F. Penelitian Terdahulu	44
 BAB III METODOLOGI	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	46
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	48
1. Wawancara	48
2. Observasi.....	48
3. Dokumentasi	48

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
F. Teknik Uji Keabsahan Data.....	50
1. Perpanjangan Pengamatan	50
2. Triangulasi	51
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum.....	52
1. Waktu dan Tempat Penelitian	52
2. Visi dan Misi Desa Hutaraja	52
3. Letak Geografis Desa Hutaraja	53
4. Penduduk Desa Hutaraja	53
B. Temuan Khusus.....	55
1. Manajemen Pembangunan di Desa Hutaraja	55
a. Pembangunan bidang pendidikan	55
b. Pembangunan bidang ekonomi	56
c. Pembangunan bidang kesehatan	58
d. Pembangunan bidang keagamaan	58
e. Sarana perkantoran.....	58
2. Manajemen Program Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan	59
3. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa Hutaraja dalam Pengembangan Pembangunan desa.....	63
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA	71
LA,PIRAN I Pedoman Wawnca	
Lampiran ii dokumentasi penelitian	
 Daftar riwayat	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim.

Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat. Di kantor desalah masyarakat mengurus KTP, masalah tanah dan memusyawarahkan urusan-urusan publik dan sebagainya dengan kata lain didesalah ujung tombak pelayanan publik. Kinerja Kepemimpinan yang sesungguhnya dari seorang kepala desa beserta aparat kemudian akan diterimanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Pada dasarnya pembangunan selalu bersumber pada tiga komponen pokok pembangunan antara lain: masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Kegiatan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pada saat ini sangat berat, maka sangat diperlukan adanya keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat melaksanakan partisipasi, bekerja keras, karena kunci keberhasilan pembangunan yaitu kerja keras dan kerja sama dari seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam hal ini Allah Swt. Memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan apa-apa yang hendak kita kerjakan sebagaimana firman Allah yang tercantum didalam al-Quran Surah Al-hashr ayat 18 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹

Dalam proses menemukan sebuah hasil penelitian, tentunya penelitian memerlukan informan penelitian yang akurat dalam mengembangkan data yang diperlukan. Oleh karena itu, peneliti mengambil 6 (orang) informan penelitian dari masyarakat yang berpengaruh untuk mengembangkan pembangunan didesa Hutaraja kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2002), hlm. 206.

Mereka adalah kepala desa, wakil kepala desa, sekretaris, kaur keuangan, kaur pembangunan, dan hatobangon.

Manajemen pembangunan desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan kepala desa Huta Raja berdasarkan observasi awal adalah bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugas dan pembangunan desa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cukup meresahkan masyarakat desa Hutaraja seperti kondisi penumpukan sampah yang tidak pada tempatnya dan pembangunan yang tidak merata. Awalnya sudah diupayakan oleh beberapa masyarakat desa tentang masalah tersebut dengan harapan akan mendapat tanggapan dan solusi dari kepala desa.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dilakukan penelitian tentang manajemen pembangunan desa Huta Raja dengan judul **“MANAJEMEN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI HUTA RAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL”**.

B. Fokus Masalah

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari rakyat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Dengan demikian, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sebenarnya manajemen pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola.² Manajemen yang dalam bahasa Inggris berupa *management* atau “*managing*” yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengurusan, pengelolaan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pengendalian, penyelenggaraan maupun penanganan.³

Adapun manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu sikap dalam membangun desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Mencangkup Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Actuating), Pengendalian (Controlling).

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁴ Dalam penelitian ini, masyarakat yang dimaksud oleh peneliti adalah masyarakat desa Hutaraja kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal.

² Bedjo Siswanto, *Manajemen Modern* (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 23.

³ *Ibid.*, hlm. 24.

⁴ Kementerian Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm. 217.

3. Pembangunan

Pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusi.⁵

Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemebangunan yang dilaksanakan di Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

4. Desa

kesatuan wilayah yg dihuni oleh sejumlah keluarga yg mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).⁶ Dari sisi lain, desa juga merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah manajemen masyarakat dalam pembangunan desa di Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui manajemen masyarakat dalam pembangunan desa di Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian mengenai pembangunan dalam membangun Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal melalui manajemen pembangunan desa yang dilakukan kepala desa.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kepala Desa Huta Raja dalam melaksanakan dan sebagai tanggung jawab sebagai kepala dalam kemasyarakatan.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas pokok masalah yang sama.
- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pengumpulan data gambaran secara ringkas mengenai proposal ini, maka sistem penulisannya akan dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi uraian-uraian yang mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian serta pentingnya masalah tersebut diteliti dan dibahas. Fokus masalah berisikan uraian penelusuran dan penjabaran seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Batasan istilah berisikan tentang batasan ruang lingkup penelitian hanya pada beberapa aspek atau sub masalah yang dipandang lebih

dominan dan urgen. Rumusan masalah yaitu penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti. Manfaat penelitian adalah sumbangsi berupa ilmu dari hasil penelitian yang bermanfaat bagi peneliti, perusahaan dan peneliti selanjutnya. Sistematika pembahasan yaitu berisikan tentang isi dari penelitian untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini.

Bab II Landasan teori yaitu mengulas tentang permasalahan-permasalahan yang ada didalam penelitian dengan sub-sub pembahasan penelitian terdahulu, kerangka pikir dan juga hipotesis.

Bab III Metode penelitian yang membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, teknik menjamin keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian yang membahas tentang temuan umum yaitu mengenai tempat penelitian dan temuan khusus yaitu mengenai manajemen program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa hutaraja dalam pengembangan pembangunan desa.

Bab V penutup membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Masyarakat

1. Pengertian Manajemen

Banyak pakar manajemen yang mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian manajemen. Untuk mengetahui pengertian manajemen maka berikut ini diketengahkan beberapa pendapat untuk membantu dalam memahami konsep dasar manajemen.

Secara umum aktivitas manajemen ada dalam organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.⁷ Pendapat ini dipahami bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen.⁸ Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, pemerintahan, sekolah, industri, rumah sakit dan lain-lain.

Proses di sini menghadirkan berbagai fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan oleh manajer dan anggota atau bawahannya dalam suatu organisasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan

⁷ Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 67.

⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas manajerial itu dilakukan oleh para manajer organisasi dapat mendorong sumber daya personil (pegawai atau anggota) bekerja memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi yang disepakati bersama dapat tercapai.⁹

Dengan demikian pada hakikatnya proses manajemen dilakukan para manajer di dalam suatu organisasi, dengan cara-cara atau aktivitas tertentu mereka mempengaruhi para personil atau anggota organisasi, pegawai, karyawan atau buruh agar mereka bekerja sesuai prosedur, pembagian kerja, dan tanggung jawab yang diawasi untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam perspektif lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.¹⁰

Dengan kata lain, organisasi adalah wadah bagi operasionalisasi manajemen. Sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu: Unsur manusia (*men*), barang-barang (*materials*), mesin (*machines*), metode (*merbah*), uang (*money*) dan pasar (*market*). Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling

⁹ Sofian Efendi, dkk., *Membangun Martabat Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 178.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 179.

berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.¹¹

Efisien ialah hubungan antara input (masukan) dengan output (keluaran). Jika hasil yang dicapai lebih banyak daripada input (masukan/modal) yang dikeluarkan maka hal itu dimaksudkan sebagai efisien. Manakala seorang manajer memanfaatkan sumber daya masukan seperti, uang, orang-orang, dan peralatan dapat dihemat/diminimalisir untuk mencapai suatu tujuan merupakan hakikat efisiensi. Sedangkan efektif adalah pencapaian aktivitas-aktivitas secara sempurna sesuai tujuan yang akan dicapai. Pencapaian tujuan organisasi atau kegiatan tertentu berkaitan dengan tingkat efektivitas.

Manajemen ialah pemanfaatan sumber daya fisik dan manusia melalui usaha yang terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan. Dalam pendapat ini disadari betul betapa pentingnya peranan sumber daya (*resources*) yang dimiliki organisasi, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material. Karena pemanfaatan kedua sumber daya tersebut oleh manajer dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien akan mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.¹² Pemanfaatan sumber daya organisasi tersebut dimulai dari melakukan perencanaan yang tepat, pengorganisasian yang mantap, penyusunan staf yang tepat dan profesional, pengarahan dan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 175

¹² Tim Pengembangan dan Pembinaan Koperasi, *Pengembangan dan Pembinaan Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 59.

pengawasan yang terkendali dengan baik akan menjamin berfungsinya proses manajerial.

Konfigurasi manajemen sebagaimana dalam beberapa definisi yang dikemukakan di atas, berisikan adanya organisasi sebagai wadah formal, adanya manajer yang melakukan aktivitas manajemen, adanya anggota organisasi bisnis atau perusahaan dan organisasi jasa lainnya, serta fungsi-fungsi dan prosedur yang harus dijalankan sebagai ilmu yang bersumber dari pengalaman empiris selama ini.¹³

2. Pentingnya Manajemen

Pada dasarnya kemampuan manusia terbatas (fisik, pengetahuan, waktu dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan keterikatan formal dan suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.¹⁴

Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dengan manajemen yang

¹³ *Ibid.*, hlm.60.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.61.

baik maka pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga tujuan optimal akan tercapai.

Manajemen pada dasarnya sudah ada sejak adanya pembagian kerja, tugas, tanggung jawab, dan kerja sama formal dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Tegasnya, manajemen sudah ada sejak adanya pemimpin/pengatur dan bawahan yang diatur untuk mencapai tujuan bersama, walaupun masalahnya masih sangat sederhana. Pada saat itu manajemen belum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi masih tergabung dalam ilmu sosiologi, hukum, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya.¹⁵

Manajemen pada dasarnya baru dapat diterapkan, jika:

- 1) Ada tujuan bersama dan kepentingan yang sama yang akan dicapai.
- 2) Ada kerja sama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal dan ikatan tata tertib yang baik.
- 3) Ada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur.
- 4) Ada hubungan formal dan ikatan kerja yang tertib.
- 5) Ada sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan.
- 6) Ada organisasi (wadah) untuk melakukan kerja sama.
- 7) Ada wewenang (*authority*) dan tanggung jawab (*responsibility*) dari setiap individu anggota.¹⁶
- 8) Ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) dari proses manajemen tersebut.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm.64.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.65.

- 9) Ada pemimpin/pengatur dan bawahan yang akan diatur.
- 10) Ada *relationship in organization* dan *human organization*.
- 11) Ada *the nature of men and the nature of organization*.
- 12) Ada komunikasi dan *delegation of authority*.¹⁸

Ayat yang menjelaskan tentang pentingnya manajemen dalam hidup terdapat dalam Surah Al-hashr ayat 18 seperti di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

¹⁷ Ibid., hlm.67.

¹⁸ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah Cet. 5* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 3-5.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya, Op.Cit.*, hlm. 156.

3. Fungsi-fungsi Manajemen

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar risiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah memilih, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif perencanaan pun tidak ada. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.²⁰

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian (*organizing*) atau pembagian kerja berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. Pengorganisasian dapat

²⁰ Malayu S.P Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 91-92.

diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.²¹

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pengarahan yang dimaksud adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta utuk bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian”.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana, atau pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara”.²²

²¹*Ibid.*, hlm. 118-119.

²²*Ibid.*, hlm. 41.

4. Pengertian Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas.

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

5. Pemabagian Jenis Masyarakat

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada beberapa jenis masyarakat yaitu:

- a. Masyarakat pemburu
- b. Masyarakat pastoral nomadis
- c. Masyarakat bercocok tanam, dan
- d. Masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban.

Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca- industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional. Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya yaitu berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan masyarakat negara.²³

Dari uraian tersebut dapat penulis tarik kesimpulan yakni manajemen masyarakat adalah kemampuan masyarakat baik pejabat pemerintahan untuk mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya.

B. Pembangunan Desa

1. Pembangunan dari dalam (*Development from Within*)

Kita mengetahui serba sedikit tentang proses motivasi dan dinamika hidup yang memungkinkan kaum miskin mempertahankan kehidupannya. Kita hanya mengetahui bagaimana ketergantungan mereka pada fluktuasi pendapatan dan harga-harga bahan makanan. Mereka tidak mampu menolak tingkat gaji yang ditawarkan kepadanya betapapun rendahnya atau menunda pembelian bahan makanan pada saat harga melambung tinggi. Tetapi kita benar-benar kurang memahami struktur sosial dan budaya kemiskinan sehingga kita mampu memotong pola kemiskinan, keterbelakangan dan keterlibatan mereka dalam utang secara permanen.

Mengefektifkan pelayanan pada kelompok desa berarti mengefektifkan bekerjanya *basic communities* yang berorientasi pada

23

pengembangan untuk masa depan atau dengan perkataan lain penanggulangan masalah golongan ekonomi lemah atau masyarakat miskin hanya bisa dilakukan melalui golongan ekonomi lemah dan masyarakat miskin itu sendiri atau melalui pembangunan dari dalam. Yaitu dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk mengorganisir diri serta membangun sesuai dengan tujuan yang mereka kehendaki. Usaha pengembangan itu perlu dilakukan dalam wadah kelompok kecil (Kelompok swadaya) yang hidup sedemikian rupa sehingga interaksi di antara individu merupakan proses pendidikan saling ‘‘asah’’ asuh’’ dan’’ asih’’. Dalam kelompok juga merupakan tempat untuk mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi bersama serta cara-cara mengatasinya.²⁴

Banyak teori telah diterapkan dan banyak pula pendekatan yang dilakukan. Berikut ini ditelaah beberapa teori dan pendekatan pembangunan

a. *The Trickle Down Theory*

Latar belakang penjajahan yang berlangsung lama dan secara efektif menggunakan kekuasaan feodal pribumi yang opresif terhadap rakyat miskin dan tak berdaya, telah meninggalkan suatu warisan tatanan ekonomi sosial serta mentalitas yang tidak siap mengemban kemerdekaan politik yang telah kita raih dan mengisinya dengan pembangunan paripurna.²⁵ Karena merasa telah ketinggalan, maka kita mengejanya dengan program percepatan pembangunan melalui program-program

²⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁵ Adisasmita, R., *Azaz Pembangunan Desa*, (Makassar: Graha Ilmu, 2006), hlm 84.

pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi yang hasilnya disamping dinikmati oleh mereka yang secara langsung terkena sasaran program tersebut, diharapkan bisa juga merembes pada masyarakat yang lebih luas (*Trickle Down*). Disamping itu oleh karena program-program pembangunan direncanakan secara terpusat sering tidak sesuai dengan masala-masalah yang dihadapi dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh massa bawah yang menjadi tujuan pembangunan. Di tingkat pedesaan, pendekatan *Trickle Down Theory* tampaknya berpengaruh juga pada pendekatan pembinaan koperasi (KUD). Dengan berorientasikan pada skala usaha ekonomi besar, selama 10 tahun (1967-1978) unit koperasi telah bergeser dari Pedukuhan ke Kecamatan.²⁶

- b. Undang-undang No. 12/1967 menentukan bahwa minimal 20 orang bisa mendirikan satu unit koperasi. Koperasi bisa didirikan di tingkat pendukuhan.²⁷
- c. Surat keputusan menteri transmigrasi dan koperasi No. 61/1972 mengatur bahwa kperasi pada hakikatnya hanya boleh didirikan di tingkat desa.²⁸
- d. Inpres No. 4/1973 menentukan bahwa satu uit koperasi mempunyai ruang lingkup satu Wilud (Wilayah Unit Desa) yang meliputi 600-1000 ha, dan biasanya merupakan gabungan dari beberapa desa.
- e. Inpres No. 2/1978 dalam peraturan pelaksanaannya mengatur dalam satu unit KUD pada dasarnya dibentuk untuk wilayah kecamatan.²⁹

²⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

²⁷ Imam Subky, [http://blog, Teori-teori dan Pendekatan Pembangunan.co.id.](http://blog.Teori-teori%20dan%20Pendekatan%20Pembangunan.co.id/), blogspot, diunggah pada hari Minggu, 4 April 2021, pkl 11.30 WIB.

²⁸ *Ibid.*

f. *Basic Needs Approach*

Mayoritas penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan menyingkir dan terus membanjiri kota-kota besar tapi tetap tidak mungkin ditampung oleh industri-industri besar dan prasarana modern. Terjadi kekurangan pangan lapisan rakyat-rakyat termiskin bukan saja tak tertolong, tetapi kian meluas. Kepincangan sosial semakin tajam antara yang di kota dan di desa, yang kaya dan yang miskin, si kuat dan si lemah dan sebagainya.³⁰

Surah Huud ayat 61 menjelaskan tentang pembangunan, sebagai berikut.

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَنْقُومِرَ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝۶۱﴾

Artinya:

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Op.Cit., hlm. 396.

Ayat tersebut menjelaskan manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Salah satu cara memakmurkan dunia dengan memperbaiki pembangunan yang sudah ada atau menciptakan pembangunan yang bermanfaat bagi manusia.

2. Desa

a. Pengertian desa

Istilah desa berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota dan perkotaan.³²

Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri atau desa juga merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain. Adapun ciri-ciri masyarakat pedesaan sebagai berikut:³³

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.

³² Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 231.

³³ *Ibid.*, hlm. 235.

3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.³⁴

Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat yang hakikatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di mana ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.³⁵

Adapun yang menjadi ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain sebagai berikut:

- 1) Di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batasbatas wilayahnya.
- 2) Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*Gemeinschaft* atau paguyuban).

³⁴ *Ibid.*, hlm. 237.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 237-238.

- 3) Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari per. tanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian meru. pakan pekerjaan sambilan (*part time*) yang biasanya sebagai pengisi waktu luang.
- 4) Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencarian, agama, adat istiadat dan sebagainya.³⁶

Oleh karena anggota masyarakat mempunyai kepentingan pokok yang hampir sama, maka mereka selalu bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Seperti pada waktu mendirikan rumah, upacara pesta perkawinan, memperbaiki jalan desa, membuat saluran air dan sebagainya, dalam hal-hal tersebut mereka akan selalu bekerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat sering diistilahkan dengan gotong-royong dan tolong-menolong. Pekerjaan gotong-royong pada waktu sekarang lebih populer dengan istilah kerja bakti misalnya memperbaiki jalan, saluran air, menjaga keamanan desa (ronda malam) dan sebagainya.

Sedang mengenai macamnya pekerjaan gotong-royong (kerja bakti itu ada dua macam, yaitu :

- 1) Kerja bersama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri (biasanya diistilahkan dari bawah).
- 2) Kerjasama untuk pekerjaan-pekerjaan yang inisiatifnya tidak timbul dari masyarakat itu sendiri berasal dari luar (biasanya berasal dari atas).³⁷

³⁶ Maria Eni Surasih, *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 58.

Kerjasama jenis pertama biasanya, sungguh-sungguh dirasakan kegunaannya bagi mereka, sedang jenis kedua biasanya sering kurang dipahami kegunaannya.

b. Hakikat dan sifat masyarakat pedesaan

Seperti dikemukakan oleh para ahli atau sumber bahwa masyarakat Indonesia lebih dari 80% tinggal di pedesaan dengan mata pencarian yang bersifat agraris. Masyarakat pedesaan yang agraris biasanya dipandang antara sepintas kilas dinilai oleh orang-orang kota sebagai masyarakat tentang damai, harmonis yaitu masyarakat yang adem ayem, sehingga oleh orang kota dianggap sebagai tempat untuk melepaskan lelah dari segala kesibukan, keramaian dan keruwetan atau kekusutan pikir.³⁸

Maka tidak jarang orang kota melepaskan segala kelelahan dan kekusutan pikir tersebut pergilah mereka ke luar kota, karena merupakan tempat yang adem adem, penuh ketenangan. Tetapi sebetulnya ketenangan masyarakat pedesaan itu hanyalah terbawa oleh sifat masyarakat itu yang oleh Ferdinand Tonies diistilahkan dengan masyarakat *gemeinschaft* (paguyuban). Jadi keguyuban masyarakat itulah yang menyebabkan orang-orang kota menilai sebagai masyarakat desa itu tenang harmonis, rukun dan damai dengan julukan masyarakat yang adem ayem.

³⁷ Suhendra, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 90.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

Tetapi sebenarnya di dalam masyarakat pedesaan kita ini mengenal bermacam-macam gejala, khususnya tentang perbedaan pendapat atau paham yang sebenarnya hal ini merupakan sebab-sebab bahwa di dalam masyarakat pedesaan penuh dengan ketegangan-ketegangan sosial.

Dalam hal ini kita jumpai gejala-gejala sosial yang sering diistilahkan dengan:

1) Konflik (Pertengkaran)

Ramalan orang kota bahwa masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang tenang dan harmonis itu memang tidak sesuai dengan kenyataan sebab yang benar dalam masyarakat pedesaan adalah penuh masalah dan banyak ketegangan. Karena setiap hari dari mereka yang selalu berdekatan dengan orang-orang tetangganya secara terus-menerus dan hal ini menyebabkan kesempatan untuk bertengkar amat banyak sehingga kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa peledakan dari ketegangan amat banyak dan sering terjadi.³⁹

Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi biasanya berkisar pada masalah sehari-hari rumah tangga dan sering menjalar ke luar rumah tangga. Sedang sumber banyak pertengkaran itu rupa-rupanya berkisar pada masalah kedudukan dan gengsi, perkawinan, dan sebagainya.

³⁹ Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 178.

2) Kontraversi (pertentangan)

Pertentangan ini bisa disebabkan oleh perubahan konsep-konsep kebudayaan (adatistiadat), psikologi atau dalam hubungannya dengan guna-guna (*black magic*). Para ahli hukum adat biasanya meninjau masalah kontraversi (pertentangan) ini dari sudut kebiasaan masyarakat.⁴⁰

3) Kompetisi (Persiapan)

Sesuai dengan kodratnya masyarakat pedesaan adalah manusia-manusia yang mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasanya yang antara lain mempunyai saingan dengan manifestasi sebagai sifat ini. Oleh karena itu maka wujud persaingan itu bisa positif dan bisa negatif. Positif bila persaingan wujudnya saling meningkatkan usaha untuk meningkatkan prestasi dan produksi atau out put (hasil). Sebaliknya yang negatif bila persaingan ini hanya berhenti pada sifat iri, yang tidak mau berusaha sehingga kadang-kadang hanya melancarkan fitnah-fitnah saja, yang hal ini kurang ada manfaatnya sebaliknya menambah ketegangan dalam masyarakat.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 180.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 181.

c. Kegiatan pada masyarakat pedesaan

Masyarakat pedesaan mempunyai penilaian yang tinggi terhadap mereka yang dapat bekerja keras tanpa bantuan orang lain. Jadi jelas masyarakat pedesaan bukanlah masyarakat yang senang diam-diam tanpa aktivitas, tanpa adanya suatu kegiatan tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Jadi apabila orang berpendapat bahwa orang desa didorong untuk bekerja lebih keras, maka hal ini tidaklah mendapat sambutan yang: sangat dari para ahli. Karena pada umumnya masyarakat sudah bekerja keras. Tetapi Para ahli lebih untuk memberikan perangsang-perangsang yang dapat menarik aktivitas masyarakat pedesaan dan hal ini dipandang sangat perlu. Dan dijaga agar cara dan irama bekerja bisa efektif dan efisien serta kontinyu (diusahakan untuk menghindari masa-masa kosong bekerja karena berhubungan dengan keadaan musim/iklim di Indonesia).⁴²

Petani Indonesia mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- 1) Petani itu tidak kolot, tidak bodoh atau tidak malas. Mereka sudah bekerja keras sebisa-bisanya agar tidak mati kelaparan.
- 2) Sifat hidup penduduk desa atau para petani kecil (petani gurem) dengan rata-rata luas sawah & 0,5 ha yang serba kekurangan, menyerah kepada takdir dan merasa tidak berdaya.⁴³

⁴² *Ibid.*, hlm. 182.

⁴³ Meriani, <http://blogspot. Ciri-ciri> Masyarakat Desa, diunggah pada hari Sabtu, 5 Desember 2020, pk. 21.00 WIB.

Melanjutkan pandangan orang kota terhadap desa itu bukan tempat bekerja melainkan untuk ketentraman adalah tidak tepat karena justru bekerja keras merupakan kebiasaan petani agar dapat hidup. Untuk membangun suatu masyarakat yang ekonominya terbelakang itu harus dapat menyediakan suatu sistem perangsang yang dapat menarik suatu aktivitas warga masyarakat itu dan harus sedemikian rupa sehingga dapat memperbesar kegiatan orang bekerja, memperbesar keinginan orang untuk menghemat, menabung, keberanian mengambil resiko, dalam hal mengubah secara revolusioner cara-cara yang lama yang kurang produktif.⁴⁴

d. Masalah-masalah pokok pedesaan

Dalam hubungan dengan masalah pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan pedesaan ini, maka persoalan kita adalah mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Untuk mengetahui itu kita perlu melihat kondisi pedesaan kita dewasa ini, Sehingga kita akan mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa yang sungguh-sungguh diperlukan. Kemudian kita mencoba memberikan jawabannya. Dan akhirnya kita bertanya apa yang dapat kita lakukan sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM).⁴⁵

Kalau kita berbicara mengenai desa, maka yang segera tampak kepada kita ialah bahwa sebagian besar penghuni desa-desa kita adalah miskin dan terbelakang. Jadi berbicara tentang desa sebenarnya kita

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Peter Hagul, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat Edisi 1 Cet. 2* (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 26.

berbicara tentang kemiskinan dan keterbelakangan serta bagaimana memeranginya. Dan kalau kita berbicara masalah kemiskinan dan keterbelakangan ini, maka kita menghadapi masalah yang sangat besar dan kompleks. Tetapi kalau masalah tersebut kita sederhanakan, maka masalah pokoknya adalah:⁴⁶

1. Pendapatan yang rendah
2. Adanya kesenjangan yang dalam antara yang kaya dan miskin, di mana yang miskin adalah mayoritas
3. Partisipasi rakyat yang minim dalam usaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

Keadaan yang demikian itu mempunyai sebab yang kompleks, namun kalau kita sederhanakan juga, akan tampak sebab-sebab pokok sebagai berikut:

1. Kurangnya pengembangan sumber daya alam
2. Kurangnya pengembangan sumber daya manusia
3. Kurangnya lapangan kerja
4. Adanya struktur masyarakat yang menghambat.⁴⁷

e. Pendidikan pedesaan

Masalah pokok pedesaan adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang dapat dilihat dari pendekatan pembangunan. Sedangkan implikasi dari pendekatan pembangunan dari dalam ini adalah perlunya membentuk kelompok swadaya yang dinamis berorientasi pada upaya peningkatan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 30

pendapatan, bekerja secara mandiri (*self organization dan management*) dengan partisipasi anggota yang wajar serta terus menerus mengusahakan identifikasi masalah dan penentuan strategi alternatif pemecahan. Untuk mencapai posisi tersebut perlu diadakan berbagai upaya pendidikan.

Dalam rangka itu perlu pertama-pertama diingat bahwa kelompok itu sendiri merupakan wadah dari suatu proses saling belajar dan saling mengajar dari para anggota. Mereka saling memberi dan menerima informasi dari pengalaman serta saling meneguhkan dan memperkuat motivasi masing-masing. Dalam kelompok terjadi proses pendidikan yang efektif dan efisien sekali karena bertolak dari kemampuan masing-masing, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan bersama. Pada proses pendidikan semacam ini tak terjadi kesenjangan yang lazimnya dialami oleh pola pendidikan dengan adanya guru dan murid. Disamping itu untuk meningkatkan kemandirian kelompok, perlu diadakan berbagai upaya pendidikan berdasarkan analisis kebutuhan latihan (*training need analysis*).⁴⁸

Metode dan proses latihan adalah partisipatif, yaitu refleksi atas pengalaman pribadi peserta yang didiskusikan dan musyawarah bersama. Jadi secara singkat bisa dikemukakan bahwa pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan pedesaan adalah pendidikan kemandirian di dalam kelompok-kelompok kecil di pedesaan. Proses pendidikan itu pertama-tama berjalan dengan berperan sertanya anggota kelompok dalam

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 32

penyelenggaraan kelompok, melalui interaksi tatap muka yang teratur dan terarah. Karena itu kelompok harus dinamis, dengan tujuan dan struktur yang jelas, demikian juga kegiatan-kegiatan dan kekompakannya.⁴⁹

Selanjutnya atas dasar kebutuhan pengembangan lebih lanjut upaya-upaya pendidikan lain diberikan. Upaya-upaya pendidikan ini harus disusun isi, metode, cara penyelenggaraan, tempat dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok yang bersangkutan. Untuk menyertai kelompok-kelompok tersebut diperlukan pembinaan yang harus dipilih dan dipersiapkan dengan cermat dengan *training* yang memadai. Dan untuk itu diperlukan lembaga-lembaga yang secara khusus bekerja untuk pengembangan kelompok tersebut.⁵⁰

f. Pemerintahan desa

Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa sebagai berikut:

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

- 1) Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁵¹
- 2) Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggungjawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu ke Bupati.⁵²
- 3) Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- 4) Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk BPD yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.⁵³
- 5) Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 36.

⁵² *Ibid.*, hlm. 37

⁵³ *Ibid.*, hlm. 38.

pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

6) Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Pemerintah desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.⁵⁴

g. Susunan pemerintahan desa terdiri dari

Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi menayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

C. Dasar-Dasar Pembangunan Desa

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering dicampuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebut bahwa pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.

Adapun tujuan pembangunan desa meliputi:

1. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
2. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
3. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
4. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.⁵⁶

Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Menurut Napitupulu bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha usaha pembangunan, pemanfaatan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya di dalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur material serta spiritual berdasarkan pancasila di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah, hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

D. Tipologi desa

Tipologi desa dapat dilihat dari beberapa aspek dominan seperti mata pencaharian dan pola interaksi sosial yang terbangun. Dari mata pencaharian pokok dapat ditentukan tipe desa beserta karakteristik dasarnya. Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni:

1. Desa swadaya (tradisional)

Desa swadaya merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut:

- a) Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional).
- b) Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah pertahun.
- c) Adat istiadat masih mengikat kuat.
- d) Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
- e) Prasarana masih sangat kurang.
- f) Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.

g) Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.⁵⁸

2. Desa swakarya (Transisi)

Desa swakarsa merupakan desa yang mengalami perkembangan lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan lebih kuat dan berkembang lebih baik serta lebih kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

- a) Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai melupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
- b) Produksi desa masih pada tingkat sedang yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
- c) Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, adat 4-6 lembaga yang hidup.
- d) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
- e) Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
- f) Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.⁵⁹

⁵⁸ Jayadinata, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB, 2006), hlm. 90.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

3. Desa swasembada (maju/berkembang)

Desa swasembada merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Sarana dan prasarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

- a) Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.
- b) Produksi desa tinggi dengan penghasilan usaha diatas 100 juta rupiah pertahun.
- c) Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- d) Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
- e) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
- f) Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
- g) Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong-royong dalam pembangunan desa.⁶⁰

⁶⁰ Ibid., hlm. 95.

Kemajuan desa berpengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat. Desa yang dekat dengan kota akan memiliki kebiasaan, gaya hidup, tata nilai dan percepatan pembangunan yang berbeda dari desa yang jaraknya jauh dari kota.

E. Perencanaan Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:⁶¹

1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat rt/rw, dusun, dan desa.
2. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya masyarakat setempat.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 16.

3. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.⁶²

Kebijaksanaan pembangunan wilayah perdesaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah kepada tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi.²⁵ Dalam hal ini termasuk pula penciptaan kondisi yang menjamin keberlangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro secara sistematis, dan pelestarian lingkungan hidup.
- b. Kebijakan yang secara langsung mengarah kepada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Dalam hal ini pengembangan ekonomi rakyat paling tepat adalah melalui bentuk usaha bersama dalam wadah lembaga ekonomi (misalnya melalui kelompok tani). Harus dilakukan terhadap:⁶³

- 1) Akses terhadap sumberdaya
- 2) Akses terhadap teknologi (menggunakan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien)
- 3) Akses terhadap pasar, dimana produk yang dihasilkan dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah dan harga jual yang lebih tinggi.

⁶² *Ibid.*, hlm. 47.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 48.

4) Akses terhadap sumber pembiayaan dan informasi.⁶⁴

c. Kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Kebijakan ini misalnya: jaminan pengaman sosial (JPS) yang memberikan bantuan uang kepada orang miskin, peraturan yang melindungi terhadap kegiatan usaha penduduk miskin berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan lembaga yang memberi pelayanan kepada penduduk miskin.⁶⁵

Perencanaan pembangunan perdesaan disuatu daerah (kabupaten) dilakukan untuk mengatasi masalah yang berdasarkan urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas sumber daya manusia pertanian yang belum optimal
- 2) Pembinaan petani oleh instansi teknis yang belum optimal
- 3) Produktivitas lahan rendah
- 4) Kesuburan tanah semakin berkurang
- 5) Kerusakan lingkungan.⁶⁶

Strategi dan arah pembangunan desa di Indonesia. Dapat diterangkan bahwa strategi pembangunan masyarakat desa adalah:

- a) Sesuai dengan strategi pembangunan nasional.
- b) Dilakukan secara bertahap.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

⁶⁵ Henri Faizal Noor, *Investasi Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 61.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

- c) Tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri.
- d) Dalam pelaksanaannya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis harus dapat terbina dan terpelihara.
- e) Mampu mengubah struktur perekonomian desa
- f) Dapat menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat.
- g) Dapat mengatur dan mengendalikan penyebaran dan pertumbuhan penduduk.
- h) Dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut beberapa prinsip yang telah ditetapkan.
- i) Masyarakat desa harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.
- j) Dapat memanfaatkan potensi desa secara rasional dan optimal tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam.
- k) Dilakukan melalui tahapan desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada dengan pelaksanaan secara komprehensif (menyeluruh) dan koordinatif.⁶⁷

Untuk itu perencanaan pembangunan agar diarahkan untuk mengembangkan potensi dasar (*basic potential*) unggulan melalui pengembangan potensi turunan (*derived potentials*) yang relevan. Perdesaan mempunyai banyak potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pengembangan potensi turunan utamanya adalah:

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

- 1) Pengembangan komoditas pertanian unggulan terpadu
- 2) Pemberdayaan masyarakat
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat
- 4) Pelestarian lingkungan dan konservasi alam
- 5) Pengembangan agrowisata dan wisata agro
- 6) Pengembangan industri kecil dan kerajinan.⁶⁸

Dari hasil analisis keadaan desa diperoleh petunjuk tentang:

- 1) Masalah yang dihadapi.
- 2) Potensi yang dapat digali dan dikembangkan.
- 3) Perkembangan desa yang bersangkutan.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

F. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Savarita Pitri, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).	Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Berdasarkan hasil penelitian, tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa sudah cukup efektif dimana dana yang dianggarkan untuk pembangunan sudah lebih besardalam segala bidangnya.
2	Hanny Purnamasari dan Rachmat Ramdani (Jurnal, Politikom Indonesia). 2018	Manajemen dalam Pembangunan Desa di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan dalam pembangunan desa di Desa Lemahabang dilihat dari perencanaan belum efektif karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pmbangunan desa, dalam pengorganisasian manajemen dalam pembangunan desa masih belum efektif, hal ini terlihat dari sumber daya manusia aparatur pemerintah belun sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga pembagian kerja dalam pelaksanaan pembangunan belum berjalan dengan optimal, dalam penggerakan belum efektif karena belum adanya kejelasan tentang teknis pembangunan desa serta berapa lama pembangunan desa akan dilaksanakan dan dalam pengawasan juga masih belum efektif.
3	Evolonia Dypuri Dew, HM. Jamal Amin dan Imam Surya (Jurnal, Administrative	Manajemen Pembangunan Infrastruktur dalam Rangaka Percepatan Pembangunan Daerah di	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa manajemen pembangunan infrastruktur di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ditinjau dari perencanaan, pengorganisasian/pelaksanaan,

	Reform). 2017	Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu	dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dibidang prasarana jalan dan jembatan telah berjalan cukup baik, walaupun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dibidang prasarana jalan dan jembatan yang berjalan kurang memuaskan hasilnya bagi masyarakat.
4	Umami Nurul Hidayah (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang). 2018	Analisis Strategi Program Pembangunan Desa dalam Pengentasan kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari proses perencanaan hingga penemuan hasil berawal dari tanggal 1 Januari 2020 hingga 20 Juli 2021. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah desa Hutaraja kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah menggambarkan strategi atau cara yang dilakukan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif fenomenologis. Dikatakan fenomenologis karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial dengan cara mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi, lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.⁷⁰

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data bisa didapat secara primer dan juga secara sekunder.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 43.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷¹ Adapun sumber data pokok dalam penelitian ini berasal dari kepala desa, panitia pembangunan Desa, pendamping Desa, Hatobangon, dan NNB. Peneliti akan mengambil sumber data primer ini berjumlah 6 (enam) orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Perwakilan dari Hatobangon, dan Perwakilan dari NNB

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁷² Data sekunder atau sumber data pendukung yang dijadikan oleh panitia dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat serta kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca yang bersumber dari buku panduan manajemen pembangunan desa. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder yaitu masyarakat yang berada di desa Hutaraja.

⁷¹ *Ibid.*, hlm.47.

⁷² *Ibid.*, hlm.48.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara biasa dikategorikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yaitu yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan.⁷³

Adapun jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu mengemukakan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk daftar pertanyaan untuk diajukan kepada sumber data primer dan sekunder.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomene yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam hubungan tersebut.⁷⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dengan mengamati dan memperhatikan manajemen kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa Huta Raja dalam membangun desanya.

⁷³ *Ibid.*, hlm.48.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.49.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷⁵ Untuk melengkapi data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan dan wawancara dalam penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi berupa catatan lapangan dan rekaman yang ada kaitannya dengan manajemen kepemimpinan kepala desa dalam membangun Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, tentunya teknik pengolahan data sangat diperlukan. Dibawah ini peneliti mempunyai langkah-langkah dalam menganalisis datanya, diantaranya sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik yang dibahas.
2. Reduksi data, yakni data yang sudah diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak, maka data tersebut akan dirangkun dan dipilih hal-hal yang paling pokok dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis dan deduktif yang sesuai dengan sistematis pembahasan.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.50.

4. Penarikan kesimpulan, merangkum urai-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.⁷⁶

F. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, Keabsahan data ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan teman sejawat, pengecekan anggota, analisis kasus negatif, dan kecukupan referensi”. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.⁷⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi kelapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah. Waktu yang ditentukan dalam penelitian ini selama satu bulan, maka waktu ini digunakan secara optimal, peneliti terus melakukan pengamatan lapangan guna memastikan data yang ada, mengulang-ulang observasi sehingga diketahui kebenaran data atau perubahannya.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Cetakan Ke-17* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 146.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 148.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Tekniknya dengan pemeriksaan sumber data lainnya.⁷⁸

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data dokumen yang ada, wawancara dengan berbagai sumber terkait dengan manajemen kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 150

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari proses perencanaan hingga penemuan hasil berawal dari tanggal 1 Januari 2020 hingga 20 Juli 2021. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah desa Hutaraja kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal. Desa Hutaraja memiliki luas wilayah sekitar 2765,36 Ha. Lebih jelasnya gambaran lokasi penelitian ini dapat dilihat dari gambaran letak geografisnya dan letak demokratis.

2. Visi dan Misi Desa Hutaraja

Desa Hutaraja sebagaimana desa yang lain juga pasti memiliki visi dan misi. Adapun visi desa Hutaraja adalah “Terwujudnya desa Hutaraja yang lebih maju, berprestasi, berbudaya dan kreatif melalui peningkatan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan kepedulian sosial masyarakat dan pemantapan pembangunan diberbagai bidang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka memerlukan misi yang baik. adapun misi desa Hutaraja adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan SDM berkualitas tinggi melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, kesehatan dan keagamaan;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan public;

- c. Meningkatkan pelayanan infrastruktur desa;
- d. Mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berbasis pada pertanian dalam arti luas yang berdayasaing dan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat;
- e. Meningkatkan pendapatan asli desa dengan menggali potensi desa.

3. Letak Geografis Desa Hutaraja

Dilihat dari letak geografis, desa Hutaraja yang berada di kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal yang jaraknya $\pm$ 45 Km dari Kota Padangsidempuan. Adapun batas desa Hutaraja ini apabila ditinjau dari sebelah timur berbatas dengan gunung, dari sebelah barat berbatasan dengan desa Sibaruang dan dari selatan berbatasan dengan desa Huta Puli, dan ditinjau dari utara berbatasan dengan Sungai Aek Batang Angkola Tapanuli Selatan.

4. Penduduk Desa Hutaraja

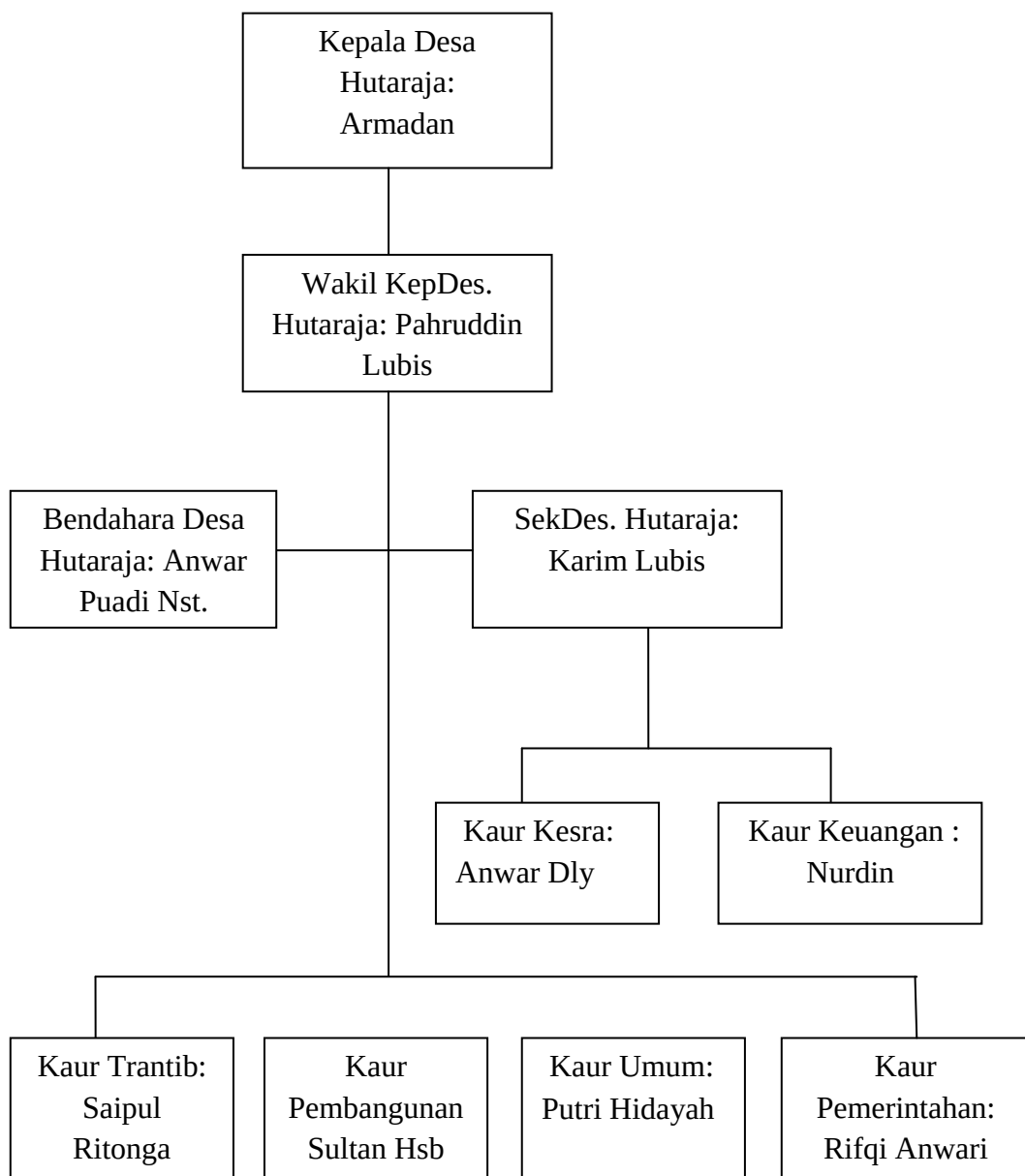
Keadaan jumlah penduduk desa Hutaraja ini memiliki penduduk berjumlah 261 kepala keluarga atau 739 jiwa, jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 346 dan perempuan 393 orang. Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat desa Hutaraja mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai honorer, petani/pekebun, buruh bangunan, pedagang dan wiraswasta.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan di desa Hutaraja

Selain data-data yang tertera sebelumnya, data umum yang ditemukan oleh peneliti mengenai struktur organisasi di desa Hutaraja kecamatan Siabu ini dapat dilihat dari bagan berikut ini:

Bagan 1:

Struktur Organisasi Pemerintahan di desa Hutaraja



Sumber: Hasil wawancara dengan kepala desa Hutaraja kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal.

B. Temuan Khusus

1. Manajemen Pembangunan di Desa Hutaraja

a. Pembangunan bidang pendidikan

1) Sarana pendidikan di desa Hutaraja

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial dan ekonomi seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik yang bersifat fisik maupun mental, maka sekolah umum, sekolah agama dan sekolah dasar tidak tertinggal dari daerah-daerah lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.

Pembangunan bidang pendidikan

NO	Jenis Sarana	Jumlah
1	Bangunan PAUD	1
2	Bangunan SD	2
3	Bangunan SMP	1

Sumber data: Statistik Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tahun 2018.

2) Tingkat pendidikan masyarakat di desa Hutaraja

Mengenai keadaan pendidikan penduduk desa Hutaraja dapat diketahui melalui tabel berikut ini:

Tabel 2:

Keadaan tingkat pendidikan masyarakat di desa Hutaraja

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	42 orang
2	SD/ sederajat	105 orang
3	SMP/sederajat	113 orang
4	SMA/sederajat	233 orang
5	Perguruan Tinggi	58 Orang
6	Belum dan putus sekolah	188 Orang
Jumlah		739 Orang

Sumber data: Statistik Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tahun 2018.

b. Pembangunan bidang ekonomi

Tanpa bekerja manusia tidak akan mendapat apa yang ia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu berusaha dan bekerja bisa dikatakan sebagai suatu amal yang mulia dan di perintahkan dalam agama islam. Mencari nafkah untuk memperoleh rezeki yang halal telah menjadi ajaran hidup masyarakat yang tertanam dalam ajaran islam yang mereka anut. Mata pencaharian masyarakat di desa Hutaraja beragam

macam yang sebagian besarnya merupakan mata pencaharian petani . Ini disebabkan pertanahan yang ada di desa Hutaraja merupakan persawahan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian, mata pencaharian umumnya masyarakat desa Hutaraja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3:

Mata Pencaharian Penduduk Desa Beringin Makmur

No	Mata Pencarian	Tingkat Pendapatan/bulan	Jumlah Orang
1	Petani/pekebun	1-5 juta	233
2	Pedagang	1-7 juta	42
3	PNS	2-4 juta	58
4	Bidan	2-8 juta	5
5	Guru honorer	1-1,5 juta	105
6	Buruh tani	1-1 juta	53
7	Wiraswasta	1-5 juta	188
8	Karyawan swasta	1-3 juta	50
9	Supir truk/angkutan	2-4 juta	30

Sumber data: Statistik Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tahun 2018.

c. Pembangunan bidang kesehatan

Sarana kesehatan sangat diperlukan untuk melayani masyarakat dalam hal kesehatan. Didesa Hutara kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal hanya terdapat 1 bangunan umum dalam bidang kesehatan yaitu Posyandu dan selebihnya apabila masyarakat Hutaraja ingin berobat, mereka akan pergi ke rumah praktek bidan yang ada di Hutaraja ini.

d. Pembangunan bidang keagamaan

Sarana ibadah sangat diperlukan untuk melayani masyarakat dalam kegiatan ibadah di desa Hutaraja kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal. Ada 2 (dua) sarana ibadah dalam pembangunan bidang keagamaan di desa Hutaraja yakni mesjid dan mushollah.

e. Sarana perkantoran

Salah satu manfaat adanya alokasi dana desa adalah membangun infrastruktur yang ada di sebuah desa. Bangunan yang dimanfaatkan guna mempermudah para pejabat pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa Hutaraja adalah dengan membangun kantor Kepala desa. Di kantor inilah kegiatan masyarakat seperti musyawarah, pembuatan KTP, Akta Kelahiran dan lainnya dapat dilaksanakan.

2. Manajemen Program Pembangunan Desa dalam Pengentasan Kemiskinan.

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu model penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dari teori tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan desa. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan tokoh-tokoh yang mengembangkan pembangunan desa di desa Hutaraja kecamatan Siabu:

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepala desa yaitu bapak Armadan yakni “Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*). Pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan yang lainnya di pedesaan, kerap kali kurang berjalan dengan baik, dan fenomena seperti ini berlangsung beberapa tahun kebelakang. Hal ini disebut- sebut diakibatkan karena terbatasnya anggaran yang terdapat di setiap pemerintahan desa, yang pada akibatnya program-program yang dilaksanakan di desa-desa tidak berjalan secara signifikan. Selain itu, tidak sedikit desa di Indonesia yang dikategorikan tertinggal. Disaat wilayah perkotaan

gencar akan program pembangunan dan penataan kotanya, wilayah pedesaan seakan-akan kurang mendapat perhatian, mungkin hampir disemua sektor. Kota dengan segala kemajuannya semakin terus maju, sedangkan desa seakan akan belum ada perkembangan. Alasan-alasan seperti itulah yang pada akhirnya pemerintah pusat mulai mengucurkan dana untuk setiap desadi Indonesia, yang disebut dengan Dana Desa (DD).⁷⁹

Pendapat lainnya diutarakan Kaur Keuangan desa oleh Ahmad Rizal Harahap yaitu dana yang dikucurkan dalam pelaksanaannya melihat pada keadaan desa itu sendiri, yang pada hal ini juga akan memengaruhi pada besaran dana yang akan diterima oleh desa tersebut. Misalnya melihat pada luas wilayah, jumlah penduduk, dan yang lainnya. Dana desa ini diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya kebijakan seperti ini, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap desa termasuk Desa Hutaraja untuk berbenah diri.⁸⁰

Ahmad Zaeni selaku sekretaris desa juga memberikan pendapatnya yaki pemberdayaan yang berlangsung di Desa Hutaraja. Tujuan dari pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat mulai mengena pada masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan kemampuan masyarakat dalam menganalisis kebutuhan masyarakat sendiri untuk bersama disepakati dalam Musdus dan Musbangdes sehingga pembangunan dapat terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.⁸¹

Selanjutnya pandangan masyarakat di sampaikan oleh Bapak Bapak

Mustofa Husein:

“Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan atau pembangunan cukup baik. Hal ini terlihat dari awal proses perencanaannya sampai pelaksanaannya, seperti ketika misalkan pemerintah desa mengadakan musyawarah desa, masyarakat hadir dengan mengeluarkan pendapat dan idenya, terus ketika pelaksanaan atau realisasi terhadap kebutuhan, mereka hadir ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan, pembangunan jalan dan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Armadan (kepala desa Hutaraja), hari Sabtu 7 November 2020, pkl. 17.00 WIB.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Rizal Harahap (Kaur Keuangan desa Hutaraja), hari Minggu 8 November 2020, pkl. 16.00 WIB.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ahmad Zaeni (Sekretaris desa Hutaraja), hari Sabtu 7 November 2020, pkl. 17.40 WIB.

pembangunan madrasah diniyah misalkan, masyarakat hadir dan ikut serta dalam kegiatan.”⁸²

Sesuai dengan penjelasan diatas, kini program pembangunan di Desa Hutaraja mulai dilaksanakan. Perubahan-perubahan dalam berbagai lini mulai terlihat. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya, Pemerintah Desa Hutaraja sendiri menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Hutaraja itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Hutaraja melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Desa Hutaraja terutama setelah adanya dana desa ini secara perlahan telah melaksanakan aktifitas dan perbaikan desa. Berbagai responpun muncul dari masyarakat, terutama terhadap aktifitas program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hutaraja.

Berbagai upaya memang telah coba dilakukan oleh pemerintah desa Hutaraja guna meningkatkan kualitas desa agar menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal pembangunan. Selain itu, dalam pembangunan di desa Hutaraja hanya baru sebatas pada ranah pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Kedepannya dana desa ini diharapkan betul-betul digunakan untuk program-program pembangunan tidak hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja, serta tepat dana desa ini tepat guna, dan tepat sasaran.

⁸² Hasil wawancara dengan Mustofa Husein (Hatobangon desa Hutaraja), hari Sabtu 7 November 2020, pkl. 13.40 WIB.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan.

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa Hutaraja dalam Pengembangan Pembangunan desa

Beberapa strategi pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hutaraja dalam meningkatkan kualitas desa sebagai berikut:

a. Perbaikan akses jalan, jembatan dan lain-lain

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat vital dan penting untuk mempercepat proses pembangunan berskala Nasional. Tidak hanya itu, dengan berjalannya pembangunan infrastruktur, akan sangat menunjang bagi masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya, serta dengan pembangunan infrastruktur ini akan berpengaruh pula dalam berbagai sektor.

Kondisi pembangunan di Desa Hutaraja saat ini memang belum berjalan secara pesat, hal ini salah satunya dapat dilihat dari perspektif pembangunan desa yang dapat dikatakan belum sepenuhnya memadai, salah satu contohnya yaitu pembangunan infrastruktur jalan desa.

Sesuai dengan salah satu misi dari Desa Hutaraja yakni mengoptimalkan sarana dan prasarana desa, maka dalam proses optimalisasi ini diawali dengan pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.

Pemerintah desa Hutaraja melakukan suatu proses perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari Program Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa ADD. Pemerintah Desa Hutaraja dalam

pemanfaatan dana desanya, secara umum memang diprioritaskan dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa Hutaraja dalam rangkan untuk memberdayakan masyarakat desa, lebih diarahkan pada perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, yang meliputi perbaikan atau pembangunan sarana publik dalam skala kecil seperti jalan desa, dan perbaikan jalan ke tempat pemakaman umum.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2020, Pemerintah Desa Hutaraja telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pembangunan jembatan, dan pembangunan jalan ke daerah perkebunan dan persawahan. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan kepala desa Hutaraja mengenai pembangunan jalan dan jembatan.

“Dengan adanya pembangunan jembatan dan jalan yang dilakukan Pemerintah Desa Hutaraja diharapkan dapat mempermudah jalannya perekonomian di Desa Hutaraja. Pemerintah desa Hutaraja giat dalam mengupayakan perbaikan-perbaikan jalan, alhamdulillah kini banyak jalan menuju perkebunan dan persawahan yang dapat di perbaiki walaupun hanya disemen”⁸³

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Hutaraja, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hutaraja benar-benar dapat terasa manfaatnya.

⁸³ Hasil wawancara dengan Armadan (kepala desa Hutaraja), hari Sabtu 7 November 2020, pkl. 17.00 WIB.

b. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Maka dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Desa Hutaraja menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di kampung-kampung menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini. Selain itu, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa, serta dibarengi dengan pemberdayaan para kader-kader Posyandu. Pemerintah desa Hutaraja sendiri berharap masyarakat Hutaraja terutama para ibu hamil dan balita, mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, yang pada hakikatnya sangatlah penting mereka dapatkan terutama bagi para ibu hamil dan balita. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan kader pelayanan terpadu (Posyandu) di desa Hutaraja kecamatan Siabu.

Kami selaku kader-kader pelayanan masyarakat yang bergerak di posyandu desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik di desa kita ini. Setiap bulannya pemerintah mengadakan imunisasi balita, lansia dan perawatan bagi ibu hamil. Tentunya pelayanan ini gratis dari pemerintah baik dia obat-obatan dan juga roti untuk balita dan ibu hamil. Harapan kami selanjutnya dengan adanya program pemerintah ini, menjadikan masyarakat desa Hutaraja dapat termonitoring kesehatannya”.⁸⁴

4. Menggiatkan program PKK melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Dari segi pemberdayaan ekonomi Pemerintah Desa Hutaraja mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan mengadakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berasal dari program PKK dimana hal ini memiliki tujuan yang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, program dari KUB ini salah satunya adalah mengadakan pelatihan yaitu pelatihan menjahit dan budidaya ikan lele dan Koperasi desa. Dalam pemberdayaan PKK ini pemerintah desa Hutaraja mengalokasikan dana yang berasal dari dana desa.

Dari hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti mengenai Kelompok Usaha Bersama (KUB) di desa Hutaraja ini, salah satu pengolahan yang dilakukan oleh kepala desa adalah pengolahan Koperasi desa. Adapun kegunaan koperasi desa ini untuk masyarakat desa Hutaraja adalah untuk mengaktifkan anggota Naposo Nauli Bulung dalam mengelolah keuangan sehingga mereka juga mampu mempelajari bisnis sejak remaja. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan kepala desa mengenai pengelolaan koperasi desa:

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Astuti Nasution (kader Posyandu), hari Minggu 8 November 2020, pkl. 15.00 WIB.

“ Pemerintah desa Hutaraja juga ingin mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para pemuda dan pemudi masyarakat desa Hutaraja. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kami selaku pemerintahan desa adalah dengan mengadakan “koperasi desa” yang kami amanatkan kepada Naposo Nauli Bulung desa Hutaraja. Hal ini tentunya menjadi jalan untuk bagaimana mereka mampu berbisnis serta mengelolah keuangan menjadi pemasukan untuk uang saku mereka”⁸⁵.

“ Selain koperasi desa, kami juga melakukan upaya untuk menumbukan minat para pemuda dan pemudi didesa ini seperti kegiatan latihan menjahit. Alhamdulillah kini pemerintah memberikan bantuan berupa mesin jahit sebanyak 20 alat. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menggali bakat masyarakat dan untuk melatih serta memupuk kemampuan mereka dalam hal tatabusana”⁸⁶.

Dengan adanya koperasi desa ini menjadikan *Naposo Nauli Bulung* semakin aktif dalam mengembangkan kegiatan kemasyarakatan. Berikut ini adalah tanggapan dari ketua Naposo Nauli Bulung desa Hutaraja:

“Kami senang kepala desa dan jajarannya memberikan amanah kepada kami untuk mengelolah koperasi desa ini. Semoga teman-teman yang ikut serta dalam kepengurusan koperasi ini dapat diamahkan, dapat menggali potensi berbisni dan dapat menambah pendapatan mereka.”⁸⁷

“ Sedangkan untuk bagian masyarakat yang sudah berkeluarga, kita memberikan bantuan bibit ikan lele bagi yang hendak mengembangkan usaha budidaya ikan lele. Semoga apa-apa saja yang telah pemerintah berikan mampu dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik mungkin.”⁸⁸

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Armadan (kepala desa Hutaraja), hari Sabtu 7 November 2020, pkl. 17.10 WIB.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Armadan (kepala desa Hutaraja), hari Sabtu 7 November 2020, pkl. 17.15 WIB.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Haikal Mustofa (ketua Naposo Nauli Bulung desa Hutaraja), hari Sabtu 7 November 2020, pkl. 20.00 WIB.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Armadan (kepala desa Hutaraja), hari Sabtu 7 November 2020, pkl. 17.20 WIB.

5. Mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

BUMDes sebagai badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, salah satu hasil desa yang diperoleh dari kekayaan alam desa Hutaraja yaitu berupa air gunung yang dialirkan untuk masyarakat. Setiap bulannya masyarakat desa Hutaraja akan dikenakan biaya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) bagi masyarakat yang memasukkan air leding ke rumah (keperluan mandi dan mencuci dirumah). Sedangkan bagi yang menggunakan air leding yang dialirkan langsung kerumah akan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan dilakukannya pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka sebagai penutup peneliti akan memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa manajemen pembangunan desa di Desa Hutaraja adalah dengan menggunakan strategi pengembangan pembangunan desa.

Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintahan desa Hutaraja demi keajuan pembangunan dan infrastruktur desa yaitu:

1. Perbaikan akses jalan, jembatan dan lain-lain.
2. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu, Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu.
3. Menggiatkan program PKK melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB).
4. Mendirikan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Akibat program pembangunan desa dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan desa. Konsep pembangunan desa memahami cara pelaksanaannya dengan memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana maupun pembangunan perekonomian lewat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan-pelatihan kreativitas seperti pelatihan menjahit, budidaya ikan lele.

Rangkaian kegiatan pembangunan pedesaan terdiri dari sosialisasi, musyawarah program, pelaksanaan kegiatan dan pelatihan di desa Hutaraja kecamatan Siabu telah berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada beberapa kendala-kendala yang terjadi.

Pembangunan sarana dan prasarana memberikan kemaslahatan karena masyarakat merasakan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Sebagian masyarakat seperti petani, pedagang, buruh bangunan, wiraswasta, dan lainnya memang merasakan dampak positif dari pembangunan sarana dan prasarana karena mereka lebih mudah menggunakan akses jalan dan jembatan dalam melintasinya untuk bekerja. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki potensi dan kemampuan dalam bidangnya merasa diuntungkan karena mendapat pelatihan-pelatihan yang dapat membantu perekonomian mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran yang dapat diberikan peneliti untuk kemajuan Indonesia terutama di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu yakni: Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai masalah-masalah perkembangan perekonomian dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan perekonomian yang lebih baik. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pihak pemerintah lebih memperhatikan pembangunan perekonomian di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., *Azaz Pembangunan Desa*, Makasar: Graha Ilmu, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2002.
- Efendi, Sofian, dkk., *Membangun Martabat Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Hagul, Peter, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat Edisi 1 Cet.2*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah Cet. 5* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- <http://www.pengertiandefinisi.com/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli>.
- Jayadinata, *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*, Bandung: ITB, 2006.
- Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat:Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta : Pustaka CIDESINDO*, 2001.
- Kementerian Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Noor, Henri Faizal, *Investasi Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2015.
- Pranadjaja, *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*, Alumni Bansung, 2003.
- Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2005.
- Siswanto, Bedjo, *Manajemen Modern*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Subky, Imam, [http://:blog, Teori-teori dan Pendekatan Pembangunan.co.id](http://blog.Teori-teori%20dan%20Pendekatan%20Pembangunan.co.id),
blogspot.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Cetakan Ke-17*
Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendra, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung:
Alfabeta, 2006.

Supriatna, Tjahya, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta,
2000.

Surasih, Maria Eni, *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga,
2006.

Tim Pengembangan Dan Pembinaan Koperasi, *Pengembangan Dan Pembinaan
Koperasi*, Jakarta: Penerbit, 1992.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja sarana prasarana yang terdapat di Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
1. Bagaimana struktur manajemen pembangunan desa di Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana perencanaan manajemen pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana pelaksanaan pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
4. Bagaimana pengelolaan pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
5. Bagaimana perencanaan dalam penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
6. Bagaimana organisasi manajemen pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
7. Bagaimanakah organisasi pelaksanaan pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
8. Bagaimanakah organisasi pengelolaan pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

9. Bagaimanakah organisasi dalam penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
10. Bagaimanakah pengarahannya manajemen pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
11. Bagaimanakah pengarahannya pelaksanaan pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
12. Bagaimanakah pengarahannya pengelolaan pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
13. Bagaimanakah pengarahannya dalam penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
14. Bagaimanakah pengawasannya manajemen pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
15. Bagaimanakah pengawasannya pelaksanaan pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan siabu Kabupaten Mandailing Natal?
16. Bagaimanakah pengawasannya pengelolaan pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan siabu Kabupaten Mandailing Natal?
17. Bagaimanakah pengawasannya dalam penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

Lampiran II

Dokumentasi Wawancara

Wawancara bersama aparatur desa Hutaraja



Manajemen pembangunan bidang pendidikan di desa Hutaraja

a. Pembangunan Paud desa Hutaraja



b. Pembangunan SD



c. Pembangunan SMP



Manajemen pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat berupa jalan di desa Hutaraja



Manajemen pembangunan bidang pembangunan kantor desa di desa Hutaraja



Manajemen pembangunan bidang kesehatan (Posyandu) di desa Hutaraja



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PENELITIAN

- a. Nama : Sri Wahyuni Pane
- b. Nim : 14 304 00010
- c. T. Tanggal Lahir : Hutaraja, 17 Agustus 1996
- d. Alamat : Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal

II. PENDIDIKAN

- a. SD : SDN. Hutaraja tahun 2002-2008.
- b. SMP/MTs. : MTs. Swasta Guppi Simaninggir Siabu,
tahun 2008- 2011.
- c. SMA/MAN : MAN Siabu, tahun 2011-2014.
- d. Perguruan Tinggi : IAIN Padangsidempuan, Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi (FDIK), Prodi Manajemen Dakwah(MD),
tahun 2014-2021.

II. IDENTITAS ORANGTUA

- a. Nama Ayah : H. Darwin Pane
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Nama Ibu : almh. Hj. Lanniari Lubis
- d. Alamat : Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp- 0634-22080 Fax- 0634-24022

Nomor : 07 /In.14/F.7d/PP 00.9/07/2021

Lampiran : -

12 Juli 2021

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada :

Yth : 1. Drs. Kamaluddin, M. Ag
2. Dr. Anas Habibi Ritonga, MA
Di tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa/I tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama/Nim : SRI WAHYUNI PANE
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/MD
Judul Skripsi : "MANAJEMEN PEMBANGUNAN DESA DI
HUTA RAJA KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II. Penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/I dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Ali Sati, M. Ag
NIP.196209261993031001

Ketua Prodi
Manajemen Dakwah

Fitri Choirunnisa Siregar, M. Psi
NIP.198101262015032003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing I

Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP.19651102 199103 1 001

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II

Dr. Anas Habibi Ritonga, MA
NIP.19840403 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sititang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : 910 /In.14/F.4c/PP.00.9/07/2021

12 Juli 2021

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth. Kepala Desa Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal
Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Sri Wahyuni Pane
NIM : 1430400010
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD
Alamat : Huta Raja Siabu

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Manajemen Pembangunan Desa Di Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DESA HUTA RAJA
KECAMATAN SIABU

SURAT KETERANGAN

No. 474 /094/KD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Nama : **SRI WAHYUNI PANE**
NIM : 1430400010
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/MD
Alamat : Hutaraja Kec. Siabu

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sudah menyelesaikan skripsi dengan Judul "**Manajemen Pembangunan Desa Di Huta Raja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan mestinya.

